

### 3.4 Metode Pendekatan Analisis

#### 3.4.1 Analisis LQ Ratio

Pengujian hipotesis yang pertama, yaitu: “Mempelajari keberadaan potensi sektor ekonomi dan sub-sektor ekonomi basis di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah”, dipergunakan pendekatan analisis *location quotiens* (LQ) sebagai berikut (Budiharsono, 2001):

$$LQ_{sub} = \frac{(SE_{sub}/PDRB_{sub})}{(SE_{glob}/PDRB_{glob})}$$

Dimana:

$LQ_{sub}$  = Indeks LQ sektor ekonomi *ke-i* di Sub-Wilayah Pulau Madura.

$SE_{sub}$  = Nilai sektor ekonomi *ke-i* dalam PDRB Sub-Wilayah Pulau Madura.

$PDRB_{sub}$  = Nilai PDRB Sub-Wilayah Pulau Madura.

$SE_{glob}$  = Nilai sektor ekonomi *ke-i* dalam PDRB di Wilayah Tapal Kuda.

$PDRB_{glob}$  = Nilai PDRB di Wilayah Tapal Kuda.

Dengan menggunakan metode pendekatan analisis LQ ini, sebagaimana diambil dari intepretasi yang disampaikan oleh Budiharsono (2001), akan dapat dibaca kriteria dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai indeks LQ suatu sektor/sub-sektor ekonomi adalah 'lebih besar' dari 1 (satu), atau  $LQ \geq 1$ , maka mengidentifikasikan bahwa sektor/sub-sektor ekonomi di Sub-wilayah Pulau Madura adalah sektor/sub-sektor ekonomi 'basis'.
2. Apabila nilai indeks LQ suatu sektor ekonomi adalah 'lebih kecil' dari 1 (satu), atau  $LQ < 1$ , maka mengidentifikasikan bahwa sektor/sub-sektor ekonomi di Sub-wilayah Pulau Madura adalah sektor/sub-sektor ekonomi 'bukan basis' atau 'non-basis'.

Jika sektor ekonomi tersebut adalah sektor yang *non-tradable*, atau produksinya “tidak dapat” diperdagangkan (dibawa untuk diperdagangkan) “ke luar” dari batas-batas daerah/wilayah, maka intepretasinya adalah sebagai berikut;

1. Jika teridentifikasi sebagai sektor basis, artinya sektor ekonomi di daerah/wilayah yang bersangkutan memiliki “tingkat percepatan pertumbuhan” produksi yang “lebih besar” dari pada “tingkat percepatan pertumbuhan” sektor yang bersangkutan dalam daerah/wilayah yang lebih luas sebagai pembandingnya. Demikian pula dapat memberikan intepretasi bahwa, produksi sektor ekonomi yang bersangkutan “mampu menarik” orang-orang “di luar” batas-batas daerah/wilayah yang bersangkutan, untuk membelanjakan uangnya “ke” daerah/wilayah yang bersangkutan.
2. Jika teridentifikasi sebagai sektor non-basis, artinya sektor ekonomi di daerah/wilayah yang bersangkutan memiliki “tingkat percepatan pertumbuhan” produksi yang “lebih kecil” dari pada “tingkat percepatan pertumbuhan” sektor yang bersangkutan dalam daerah/wilayah yang lebih luas sebagai pembandingnya. Demikian pula dapat memberikan intepretasi bahwa, produksi sektor ekonomi yang bersangkutan “belum mampu” mencukupi kebutuhan konsumsi di dalam daerah/wilayah sendiri, sehingga membuat orang-orang “di dalam” daerah/wilayah tersebut membelanjakan uangnya “ke luar” daerah/wilayah.

#### **3.4.2 Analisis Penggandaan Basis**

Pengujian hipotesis yang kedua yaitu ”*Mengetahui besarnya potensi penggandaan basis (base multiplier) di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur, baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah*” menggunakan analisis penggandaan basis (*base multiplier*).

Secara matematis rumus dasar dari analisis *base multiplier* adalah sebagai berikut (Glasson, 1978):

$$Y_{Ni} = a_0 + a_1 (Y_i) + e_i$$

Dimana:

$Y_{Ni}$  = Nilai *income* sektor non-basis.

$Y_i$  = Nilai *income total*

$a_0$  = Konstanta/*intercept*

$a_1$  = Koefisien regresi yang dapat menyatakan 'proporsi' dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah.

$e_i$  = *Error term*.

Akan tetapi oleh karena pencermatan yang dilakukan adalah dalam 2 (dua) periode waktu yang berbeda, yaitu: (a) periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah, dan (b) periode setelah pelaksanaan otonomi daerah, maka guna keperluan mencermati beda waktu tersebut akan dipergunakan pertolongan variabel *dummy*. Adapun secara matematis dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut:

$$Y_{Ni} = a_0 + a_1 (Y_i) + D_i + e_i$$

Dimana:

$Y_{Ni}$  = Nilai *income* sektor non-basis.

$Y_i$  = Nilai *income total*

$D_i$  = *Dummy variable*;

0 = menyatakan periode sebelum pelaksanaan otonomi daerah

1 = menyatakan periode setelah pelaksanaan otonomi daerah

$a_0$  = Konstanta/*intercept*

$a_1$  = Koefisien regresi yang menyatakan 'proporsi' dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah.

$e_i$  = *Error term*.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan OLS (*ordinary least square*).

a. Asumsi OLS

Agar koefisien regresi dapat efisien diduga dengan metode OLS (*ordinary least square*) tersebut maka harus memenuhi asumsi klasik (Supranto, 1995) sebagai berikut:

(1)  $E(\epsilon_i) = 0$ , untuk setiap  $i$ , dimana  $i = 1, 2, 3, \dots, n$

Artinya rata-rata kesalahan pengganggu adalah nol.

(2)  $\text{Var.}(\epsilon_i) = \sigma^2$ , untuk setiap  $i$ , dimana  $i = 1, 2, 3, \dots, n$

Artinya setiap kesalahan pengganggu mempunyai varian yang sama, atau memenuhi asumsi 'homoscedastisitas' (*homoscedastic*), atau memenuhi asumsi 'tidak heteroskedastisitas' (*no-heteroscedasticity*).

(3)  $\text{Kov.}(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0$ ,  $i \neq j$ ,

Artinya tidak ada korelasi antara kesalahan pengganggu yang satu dengan kesalahan pengganggu yang lain, memenuhi asumsi 'tidak ada autokorelasi' (*no-autocorelation*).

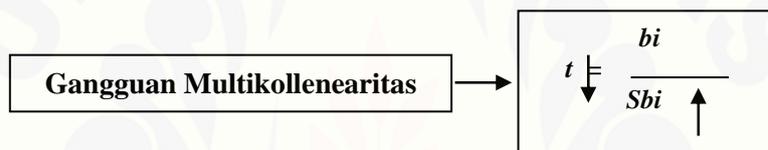
(4) Tidak ada hubungan linear yang eksak antara variabel-variabel bebas, atau memenuhi asumsi 'tidak ada multicolonearitas' (*no-colonearity*).

Jika asumsi-asumsi di atas dipenuhi, maka penduga *ordinary least square* (OLS) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) tidak bias, (b) memiliki 'varian minimum', sehingga penduga *ordinary least square* merupakan penduga yang efisien, (c) konsisten, artinya jika ukuran sampel bertambah tanpa batas, maka penduga akan mendekati nilai parameter yang sebenarnya, (d) intercept ( $\mathbf{a}$ ) memiliki distribusi normal, dengan rata-rata  $E(\mathbf{a}) = \mathbf{A}$  dan varian  $\text{Var}(\mathbf{a}) = \sigma^2 \mathbf{a}$ , dan (e) koefisien regresi ( $\mathbf{b}$ ) memiliki distribusi normal, dengan rata-rata  $E(\mathbf{a}) = \mathbf{B}$  dan varian  $\text{Var}(\mathbf{b}) = \sigma^2 \mathbf{b}$ .

Pelanggaran asumsi pada suatu regresi diantaranya:

**(a) Multikollinearitas**

Terjadi multikollinearitas, artinya ada hubungan linier yang sempurna antar variabel bebas dalam persamaan regresi. Apabila terjadi demikian maka akan menyebabkan (Nachrowi, 2002): (a) standar *error* koefisien regresi ( $S_{bi}$ ) yang diduga akan cenderung membesar, sehingga pada akhirnya di dalam uji t-statistik cenderung tidak signifikan (cenderung mengecil), atau ada kecenderungan untuk menerima  $H_0$ , dan (b) jika gangguan ini cukup parah, akan dapat membalikkan tanda koefisien regresi, sehingga bertentangan dengan paradigma teori yang berlaku (dimana hal ini akan sering terjadi apabila ada keinginan peneliti untuk memasukkan variabel sebanyak-banyaknya).



Secara statistik ada beberapa cara untuk mendeteksi gangguan asumsi multikollinearitas ini, yaitu sebagai berikut (Gujarati, 1978): (a) apabila nilai *Adjusted R-squared* cukup tinggi dan uji  $F_{\text{-statistik}}$  signifikan, akan tetapi pada uji parsial uji t-statistik baik sebagian ataupun seluruhnya tidak signifikan, maka model patut dicurigai terkena gangguan multikollinearitas, (b) apabila ada koefisien korelasi antar variabel bebas terdeteksi cukup tinggi (nilai korelasinya diatas 0,8), maka model patut dicurigai terkena gangguan multikollinearitas, (c) dibuat regresi hubungan antar variabel bebas, dan apabila penduga garis regresi tersebut memiliki  $F_{\text{-statistik}}$  yang dignifikan, maka model patut dicurigai terkena gangguan multikollinearitas.

Secara statistik ada beberapa cara untuk mengatasi gangguan asumsi multikollinearitas ini, yaitu Hendranata (2001): (a) membuang variabel bebas yang dicurigai menyebabkan model terkena gangguan multikollinearitas (diketahui dari uji korelasi antar variabel bebas), (b) menghubungkan data *cross section* dengan data *time series* (namun hal ini akan menjadi pekerjaan analisis yang cukup kompleks), dan (c) transformasi variable, misalnya dengan 'first

*deference form*' (menambah jumlah observasi). Akan tetapi menurut Mulyono (2000), apabila dipergunakan cara dengan melepas salah satu atau beberapa variabel bebas yang dicurigai menyebabkan model terkena gangguan multikollinearitas, sering kali juga menimbulkan masalah baru yang disebut dengan *spesification* bias (menyebabkan gangguan asumsi yang lebih kompleks).

### (b) Heteroskedastisitas

Terjadi gangguan heteroskedastisitas, artinya bahwa varian *error* adalah tidak sama untuk setiap observasi. Apabila terjadi demikian maka akan menyebabkan varian tidak menurun meskipun ukuran sampel diperbesar menjadi tak terhingga. Kondisi demikian ini pada akhirnya menyebabkan nilai standar eror koefisien regresi ( $S_{bi}$ ) cenderung membesar (tidak minimal) dan pada akhirnya mengakibatkan nilai  $t$ -statistik cenderung kecil (cenderung tidak signifikan), atau uji  $t$ -statistik cenderung menerima  $H_0$  (Nachrowi, 2002).



Ada banyak cara untuk memeriksa keberadaan gangguan heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi, yaitu antara lain dengan (Gujarati, 1978): (a) Uji Park, (b) Uji Gletjer, (c) Uji Spearman's *range correlation*, (d) Uji Goldfeld-Quand, (e) Uji Breusch-Pagan-Godfrey, dan (f) Uji Hal Wite. Secara lebih mudah guna mendeteksi gangguan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *White-Heteroskedasticity* (Mulyono, 2002; Hendranata, 2001). Dimana jika nilai *probabilitas Obs\*R-squared*  $< 0,05$  (pada taraf kepercayaan uji statistik  $\alpha$  5%), maka model regresi terkena gangguan heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilainya  $> 0,05$ , maka model regresi tidak terkena gangguan heteroskedastisitas.

Adapun cara guna mengatasi gangguan heteroskedastisitas ini diantaranya (Mulyono, 2002; Hendranata, 2001): (a) menggunakan model '*log*' atau '*double log*', karena setiap bilangan jika di *log* atau *ln*-kan akan menjadi kecil nilainya, sehingga *varian* akan semakin mengecil dan variasi *error*-nya juga akan semakin

mengecil, dan pada gilirannya standar eror koefisien regresi ( $S_{bi}$ ) cenderung mengecil, dan (b) menggunakan metode kuadrat terkecil terobati/*weighted least square* (akan tetapi cara ini jarang digunakan). Apabila menggunakan model 'log' atau 'double log' keuntungan lain yang didapatkan adalah langsung dapat diketahui 'elastisitasnya' (dimana hal ini banyak disukai para peneliti ekonomi).

### (c) Autokorelasi

Terjadi gangguan autokorelasi, artinya bahwa ada hubungan antara *error term* pada suatu observasi dengan *error term* pada observasi lain (Nachrowi, 2002). Hal ini sering terjadi karena dijumpai ada korelasi antar data-data pengamatan (munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya). Gangguan autokorelasi menyebabkan varian *error* cenderung mengecil sehingga standar eror koefisien regresi ( $S_{bi}$ ) juga cenderung mengecil (Gujarati, 1978). Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan nilai  $t$ -statistik semakin meningkat dan uji  $t$ -statistik cenderung menolak  $H_0$ .



Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah model regresi itu mendapatkan gangguan autokorelasi atau tidak, yaitu sebagai berikut (Mulyono, 2000; Hendranata, 2001): (a) dengan melihat plot residu, apakah mengikuti pola tertentu atau tidak, dan jika tidak mengikuti berarti model terkena gangguan autokorelasi, (b) paling populer dengan menggunakan Uji *Durbin Watson stat*, dan jika menunjukkan nilai antara 1,6 s/d 2,5, maka tidak terkena gangguan autokorelasi.

Secara statistik cara mengatasi gangguan asumsi autokorelasi adalah sebagai berikut (Mulyono, 2000; Hendranata, 2001): (a) mentransformasikan variable bebas dan varibel terikat dengan:  $(Y_t - r Y_{t-1})$  dan/atau  $(X_t - r X_{t-1})$  dimana  $r$ =korelasi antara  $e_t$  &  $e_{t-1}$ , (b) metode pembedaan pertama (*first difference methode*), dan (c) prosedur inferensi '*chocrame-orchut*'.

Kemudian nilai penggandaan basisnya (*base multiplier*) dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$M = \frac{1}{1 - (a_1)}$$

dan;

$$M = \frac{1}{1 - (a_1 + a_2)}$$

Dimana:

**M** = Nilai penggandaan basis (*base multiplier*)

**a<sub>1</sub>** = Menyatakan ‘proporsi’ dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah pada periode ‘sebelum’ pelaksanaan otonomi daerah.

**a<sub>1</sub> + a<sub>2</sub>** = Menyatakan ‘proporsi’ dari total pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas non-basis dalam perekonomian daerah pada periode ‘setelah’ pelaksanaan otonomi daerah.

Budiharsono (2001) menyatakan, masalah paling mendasar pada model ekonomi basis ini adalah masalah *time-lag*. Hal ini diakui, bahwa penggandaan basis (*base multiplier*) tidak berlangsung secara tepat, karena membutuhkan *time-lag* antara respon dari sektor basis terhadap permintaan luar wilayah dan respon dari sektor/sub-sektor ekonomi non basis terhadap perubahan sektor/sub-sektor ekonomi basis. Pendekatan yang biasanya dilakukan terhadap masalah ini adalah mengabaikan masalah *time-lag* ini, akan tetapi tetap berdasarkan pada pernyataan bahwa dalam jangka panjang masalah *time-lag* ini pasti terjadi.

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang dapat diinterpetasikan dari hasil analisis *base multiplier* ini adalah:

- Seberapa besar nilai kembalian (*outcome*) yang akan didapatkan oleh keseluruhan perekonomian (perekonomian) regional, apabila dilakukan investasi satu satuan mata uang pada sektor/sub-sektor ekonomi basis tersebut.

Apabila nilai penggandaan basis tersebut 'relatif tinggi', maka ada 'peluang' nilai *outcome* investasi yang ditanamkan pada sektor/sub-sektor ekonomi basis tersebut juga 'relatif tinggi'.

- Apabila pada *uji-t* statistik variabel dummynya terdapat nilai probabilitas 'lebih kecil' dari taraf kepercayaan uji statistik 5% ( $\alpha = 0,05$ ), maka terjadi perbedaan secara nyata pada potensi penggandaan basisnya. Sedangkan bila pada *uji-t* statistik variabel dummynya terdapat nilai probabilitas 'lebih besar' dari taraf kepercayaan uji statistik 5% ( $\alpha = 0,05$ ), maka tidak terjadi perbedaan secara nyata pada potensi penggandaan basisnya

### 3.4.3 Analisis Shift Share

Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu “Mengetahui karakteristik pertumbuhan (*characteristic of growth*) perekonomian regional di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam lingkup perekonomian regional Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur baik pada periode sebelum dan setelah dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah”, yaitu pendekatan *shift share*. Analisis *shift share* tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk meneliti faktor-faktor perkembangan regional sebagai berikut (Budiharsono, 2001):

$$\begin{aligned}
 G_j &= E_{jt} - E_{j0} \\
 &= (N_j + P_j + D_j) \\
 N_j &= E_{j0} (E_t/E_0) - E_{j0} \\
 (P + D)_j &= E_{jt} - (E_t/E_0) E_{j0} \\
 &= (G_j - N_j) \\
 &= S_j \\
 P_j &= \sum_i [(E_{it}/E_{i0}) - (E_t/E_0)] E_{ij0} \\
 D_j &= \sum_t [E_{ijt} - (E_{it}/E_{i0}) E_{ij0}] \\
 &= (P + D)_j - (P_j)
 \end{aligned}$$

Dimana:

- $G_j$  = Pertumbuhan regional total daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura).  
 $E$  = Nilai PDB dalam harga konstan.  
 $E_j$  = Nilai PDB daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura) dalam harga konstan.  
 $N_j$  = Komponen *nasional share* daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura), dan/atau pertumbuhan daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura)

apabila tingkat pertumbuhannya diasumsikan sama dengan pertumbuhan nasional.

- (P+D)<sub>j</sub>** = Komponen *net shift* bagi daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura).  
**S<sub>j</sub>** = *Shift*, dan/atau penyimpangan (*deviation*) dari *national share* dalam pertumbuhan perekonomian regional daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura).  
**P<sub>j</sub>** = Komponen *proportionality shift* bagi daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura).  
**D<sub>j</sub>** = Komponen *differential shift* bagi daerah *ke-j* (Sub-Wilayah Pulau Madura).  
**i** = Sektor *ke-i*.  
**0** = Tahun awal.  
**t** = Tahun akhir.

Pengambilan keputusan (Budiharsono, 2001):

(a) *Shift Component* (S<sub>j</sub>)

Apabila nilai *Shift* yang didapatkan adalah “lebih besar” dari 0 (nol) atau “positif”, maka pertumbuhan daerah tersebut termasuk ke dalam kelompok “progresif (maju)”. Sedangkan apabila nilai *shift* yang didapatkan adalah “lebih kecil” dari 0 (nol) atau “negative”, maka pertumbuhan daerah tersebut termasuk “lambat”.

(b) *Proportionality Shift Component Mix Growth Component* (P<sub>j</sub>)

Apabila nilai komponen pertumbuhan *proporsional* adalah “lebih kecil” dari 0 (nol) atau “negative”, menunjukkan bahwa sektor-sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan yang “lambat”. Sedangkan apabila bernilai “lebih besar” dari 0 (nol) atau “positif”, menunjukkan bahwa sector-sektor di wilayah tersebut memiliki pertumbuhan yang “cepat”.

(c) *Regional Share Component/Differential Shift Component* (D<sub>j</sub>)

Apabila nilai *regional share component* adalah “lebih besar” dari 0 (nol) atau “positif”, maka berarti bahwa wilayah tersebut mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Atau dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mempunyai *comparative advantage* bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Sedangkan apabila nilai *regional share component* adalah “lebih kecil” dari 0 (nol) atau “negative”, maka berarti wilayah yang

bersangkutan tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

### 3.5 Terminologi

1. Tapal Kuda adalah nama sebuah kawasan di provinsi Jawa Timur, tepatnya di bagian timur Pulau Jawa. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda
2. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Wilayah merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian unit geografi adalah ruang sehingga bukan merupakan aspek fisik tanah saja, tetapi lebih dari itu meliputi aspek-aspek lain, seperti biologi, ekonomi, sosial dan budaya.
4. Daerah *homogeneous* adalah suatu kesatuan wilayah dipandang dari satu/beberapa aspek (kriteria) memiliki ciri-ciri yang memiliki kemiripan atau memiliki ciri-ciri yang relatif sama.
5. Daerah nodal adalah suatu kesatuan ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi (*growth area*) dan memiliki hubungan fungsional dengan daerah belakangnya/*backwase area*.
6. Wilayah administratif atau wilayah perencanaan adalah wilayah yang menjadi ajang penerapan keputusan ekonomi.
7. *Growth area* adalah kawasan pengembangan ekonomi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan.
8. *Backwase area* merupakan daerah belakangnya yang memiliki hubungan fungsional dengan *Growth area*. Hubungan fungsional tersebut dapat dicermati dengan menggunakan kriteria sosio-ekonomi, seperti halnya arus faktor produksi, arus tenaga kerja, arus produk industri, dan sebagainya.
9. Sektor basis adalah sektor yang telah mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut. Sehingga dapat melakukan ekspor ke luar lingkup daerah tersebut

jika berupa barang *tradable*, sedangkan jika barangnya *non tradable* maka disebut sektor basis berarti telah mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut secara mandiri.

10. Sektor non-basis adalah sektor yang tidak mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut, sehingga melakukan impor dari luar lingkup daerah tersebut jika berupa barang *tradable*, sedangkan jika barangnya *non tradable* maka disebut sektor non basis berarti belum mampu mencukupi kebutuhan daerah tersebut secara mandiri.
11. Sektor dan Sub-Sektor Ekonomi di Sub-Wilayah Pulau Madura dalam Lingkup Perekonomian Regional Wilayah Tapal Kuda diantaranya :
  - a. **Sektor pertanian**, meliputi: (a) sub-sektor pangan, (b) sub-sektor perkebunan, (c) sub-sektor peternakan, (d) sub-sektor kehutanan, dan (e) sub-sektor perikanan.
  - b. **Sektor pertambangan dan penggalian**, meliputi: (a) sub-sektor pertambangan migas, (b) sub-sektor pertambangan non-migas, dan (c) sub-sektor penggalian.
  - c. **Sektor industri dan pengolahan**, meliputi: (a) sub-sektor makanan, minuman, dan tembakau, (b) sub-sektor tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki, (c) sub-sektor barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, (d) sub-sektor kertas dan barang cetakan, (e) sub-sektor pupuk, kimia, dan barang dari karet, (f) sub-sektor semen dan barang galian bukan logam, (g) sub-sektor logam dasar besi dan baja, (h) sub-sektor alat angkutan mesin dan peralatannya, dan (i) sub-sektor barang lainnya.
  - d. **Sektor listrik, gas, dan air bersih**, meliputi: (a) sub-sektor listrik, (b) sub-sektor gas, dan (c) sub-sektor air bersih.
  - e. **Sektor bangunan/konstruksi**.
  - f. **Sektor perdagangan, hotel, dan restoran**, meliputi: (a) sub-sektor perdagangan, (b) sub-sektor hotel, dan (c) sub-sektor restoran.
  - g. **Sektor pengangkutan dan komunikasi**, meliputi: (a) sub-sektor angkutan, mencakup: (i) angkutan rel, (ii) angkutan jalan raya, (iii) angkutan laut, (iv) angkutan penyeberangan, (v) angkutan udara, serta (vi)

- jasa penunjang angkutan, dan (b) sub-sektor komunikasi, mencakup; (i) pos dan telekomunikasi, serta (ii) jasa penunjang telekomunikasi.
- h. **Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan**, meliputi: (a) sub-sektor bank, (b) sub-sektor lembaga keuangan non-bank, (c) sewa bangunan, dan (d) jasa perusahaan.
- i. **Sektor jasa-jasa**, meliputi: (a) sub-sektor jasa pemerintahan umum, dan (b) sub-sektor jasa swasta, mencakup: (i) jasa sosial masyarakat, (ii) hiburan dan kebudayaan, dan (iii) perorangan dan rumah tangga.
12. Produk Domestik Regional Bruto adalah kemampuan suatu daerah dalam semua sektor ekonominya yang tercermin dari aktivitas dan hasil keluaran dari kegiatan ekonomi daerah.
13. *Time-lag* merupakan gangguan yang muncul untuk mengukur pengganda basis (*base multiplier*) untuk sektor atau sub-sub sektor ekonomi basis.
14. Barang *Tradable* adalah barang yang dapat diperjual-belikan melewati batas perekonomian suatu daerah.
15. Barang *Non Tradable* adalah barang yang tidak dapat diperjual-belikan melewati batas perekonomian suatu daerah.
16. Keunggulan relatif adalah keunggulan yang didapatkan karena kemampuan bersaing (kompetitif) dan keunggulan lokasional pada daerah tersebut (komparatif).